



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 360.2 / 6.2
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA,
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk dilakukan perubahan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 29150 halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 70);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Kewenangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I dan II keputusan ini.
- KETIGA** : Semua biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 pada Rekening Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun anggaran tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan apabila diperlukan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

ttd.

RIENA RETNANINGRUM

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : **360.2/6.2**
Tanggal : **3 JANUARI 2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM INSTANSI	TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
1.	MASHURI, ST, MM Pembina (IV/a) NIP. 19770402 200003 1 001	Ketua	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia; 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik 3. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan: a. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) b. Seleksi/penunjukkan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2.	FAJAR ISMAIL, SE Penata (III/c) NIP. 19821018 201101 1 001	Sekretaris	Pranata Komputer Ahli Muda	
3.	AGUS AMINUDIN, S.Kom Penata (III/c) NIP. 19780806 200901 1 008	Anggota	Staf Bidang TIK Diskominfo Prov. Jateng	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

ttd.

RIEMA RETWANINGRUM

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : *360.2/6.2*
Tanggal : *3 JANUARI 2022*

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	PROGRAM/KEGIATAN	TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
1	2	3	4	5
1.	FAJAR ISMAIL, SE Penata (III/c) NIP. 19821018 201101 1 001	Pranata Komputer Ahli Muda	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 1) Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 2) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah b. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Provinsi 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan	1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa; 2. Menetapkan dokumen pengadaan; 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Insitutsi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional; 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terdapat penawaran yang masuk; 7. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk Pengadaan langsung atau penunjukan langsung untuk paket

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	PROGRAM/KEGIATAN	TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
1	2	3	4	5
			<p>Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</p> <p>3) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>4) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Data Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</p> <p>5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</p> <p>6) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik</p> <p>7) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas</p>	<p>pengadaan Barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p> <p>8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;</p> <p>9. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;</p> <p>10. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</p>
2.	<p>MASHURI, ST, MM Pembina (IV/a) NIP. 19770402 200003 1 001</p>	<p>Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda</p>	<p>1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</p> <p>a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah</p>	

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	PROGRAM/KEGIATAN	TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
1	2	3	4	5
			<p>Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non elektronik 4) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi 5) Sub Kegiatan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi <p>2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Sub Kegiatan Penyediaan 	

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	PROGRAM/KEGIATAN	TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
1	2	3	4	5
		<p>4</p> <p>3) Peralatan Rumah Tangga</p> <p>4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cerakan dan Penggandaan</p> <p>6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>7) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>9) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>10) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <p>b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1) Sub Kegiatan</p>		

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	PROGRAM/KEGIATAN	TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
1	2	3	4	5
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
3.	MUHAMMAD PUJI SANTOSO, S.A.P Pembina Muda Tk. I (III/b) NIP. 19840926 201101 1 009	Staf Subbag Umum & Kepegawaian Diskominfo Prov. Jateng	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Koordinasi dan Pelaksanaan	

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	PROGRAM/KEGIATAN	TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
1	2	3	4	5
4	GALUH WIJAYASTUTI, SH Penata (III/c) NIP. 19840926 201101 1 009	Staf Subbag Umum & Kepegawaian Diskominfo Prov. Jateng	<p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah</p> <p>1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>	
			<p>4</p> <p>Akuntansi SKPD</p> <p>4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</p> <p>5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD</p> <p>d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2) Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel</p>	

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	PROGRAM/KEGIATAN	TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
1	2	3	4	5
			<p>d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <p>b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	PROGRAM/KEGIATAN	TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
1	2	3	4	5
5.	Dr. GALIH WIBOWO, S.Sos, MA Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19801020 200604 1 011	Staf Bidang IKP Diskominfo Prov. Jateng	1. Program Pengelolaan Komunikasi Publik a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 1) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2) Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media 6) Sub Kegiatan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan 7) Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis 8) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kerjasama Komunitas	

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	PROGRAM/KEGIATAN	TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
1	2	3	4	5
6.	Drs. KARTIKA HADI Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19650429 199502 1 001	Staf Bidang Statistik Diskominfo Prov. Jateng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 2. Program Pengelolaan Komunikasi Publik <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik 2) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

ttd.

RIENA RETNANINGRUM